ANALISIS DAYA SAING EKONOMI KOTA TANJUNGBALAI

Evita Khairani Nasution
Paidi Hidayat, S.E., M.Si,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penentu daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2014 dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP). Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini menggunakan data primer dengan kuisioner dan wawancara terhadap 30 responden yang terdiri dari mahasiswa, pengajar, tokoh masyarakat, birokrasi, perbankan, non perbankan, dan pengusaha.

Hasil dari penelitian ini yaitu faktor infrastruktur menjadi faktor yang paling penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai dengan bobot sebesar 0,293, diikuti dengan faktor tenaga kerja dan produktivitas dengan bobot sebesar 0,258, kemudian faktor perekonomian daerah (0,257), faktor kelembagaan (0,113), dan yang terakhir faktor sosial politik sebesar 0,080.

Kata Kunci : *Daya Saing Ekonomi, Analisis Hierarki Proses*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu indikator yang lekat dengan pembangunan ekonomi daerah. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi yang berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commission, 1999).

Pada era otonomi daerah ini pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menghadapi persoalan dalam membangun ekonomi daerahnya. Dalam menghadapi persoalan pembangunan ekonomi, maka suatu daerah harus membangun perekonomian yang memiliki daya saing dan efisien. Pada era otonomi daerah ini maka program pembangunan ekonomi daerah harus desentralistis dan memiliki daya saing, sehingga cakupannya lebihluas dan tidak hanya sekedar pembangunan ekonomi daerah (Subandi, 2011 : 140).

Menurut laporan *World Economic Forum* (WEF) dalam *Global Competitiveness Report* tahun 2014-2015 (*World Economic Forum,* 2014) menunjukkan bahwa posisi negara Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara yang disurvei. Meskipun posisi ini mengalami kenaikan dari *Global Competitiveness Report* tahun 2013-2014 yang Indonesia berada di peringkat 38, namun Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu, Singapore yang berada di peringkat ke-2, Malaysia yang berada di peringkat ke-20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Untuk negara Asia ada Jepang di peringkat ke-6, Hongkong di peringkat ke-7, Taiwan di peringkat ke-14, Korea Selatan di peringkat ke-26, dan China di peringkat ke 28.

Dari hasil penelitian PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008) dalam neraca daya saing daerah, kota Tanjung Balai berada di peringkat ke-108 secara keseluruhan dalam daya saing daerah dari 434 neraca daya saing daerah. Berdasarkan input perekonomian daerah, kota Tanjung Balai berada di peringkat 103. Peringkat ini masih di bawah kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara seperti Kabupaten Asahan yang berada di peringkat 73, Kabupaten Deli Serdang di peringkat 95, dan Kota Medan di peringkat 23. berdasarkan input SDM dan ketenagakerjaan, kota Tanjung Balai berada di peringkat 209. Berdasarkan input infrastruktur, SDA, dan lingkungan, berada di peringkat 237. Dan berdasarkan output tingkat kesempatan kerja, kota Tanjung Balai berada di peringkat 376. Ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran di kota Tanjung Balai dan infrastruktur yang masih belum memadai.

Persaingan antar daerah yang semakin ketat, membuat pemerintah daerah tak terkecuali kota Tanjung Balai dituntut untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik investasi ke kota Tanjung Balai. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah. Serta kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) , memperbaiki birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing yang tinggi pada era globalisasi ekonomi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menurut definisi UK-DTI adalah "*kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.* Sementara itu CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai "*kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya".*

The European Commission mendefinisikan daya saing sebagai "*kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk*

menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal" (European Commission, 1999 p.4. dalam Gardiner, Martin dan Tyler, 2004).

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK-BI) mengemukakan definisi daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai: *"kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional"*.

Indikator Utama Daya Saing Ekonomi Daerah

Penelitian yang dilakukan Abdullah, dkk (2002 : 15) menyebutkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem Keuangan, (4) Infrastruktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) Governance dan Kebijakan pemerintah, dan (9) Manajemen dan ekonomi mikro.

Sementara itu, hasil penelitian KPPOD (2005) yang meliputi daya tarik investasi Kabupaten/Kota di Indonesia dan menggunakan variabel kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas dan variabel infrastuktur fisik.

Kerangka Konseptual

Penentuan variabel daya saing ekonomi Kota Tanjung Balai disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini. Variabel-variabel yang menjadi indikator utama dalam penelitian ini merupakan perbandingan dari beberapa hasil penelitian, seperti KPPOD (2005). Berikut ini indikator utama penentu daya saing ekonomi Kota Tanjung Balai seperti pada gambar berikut.

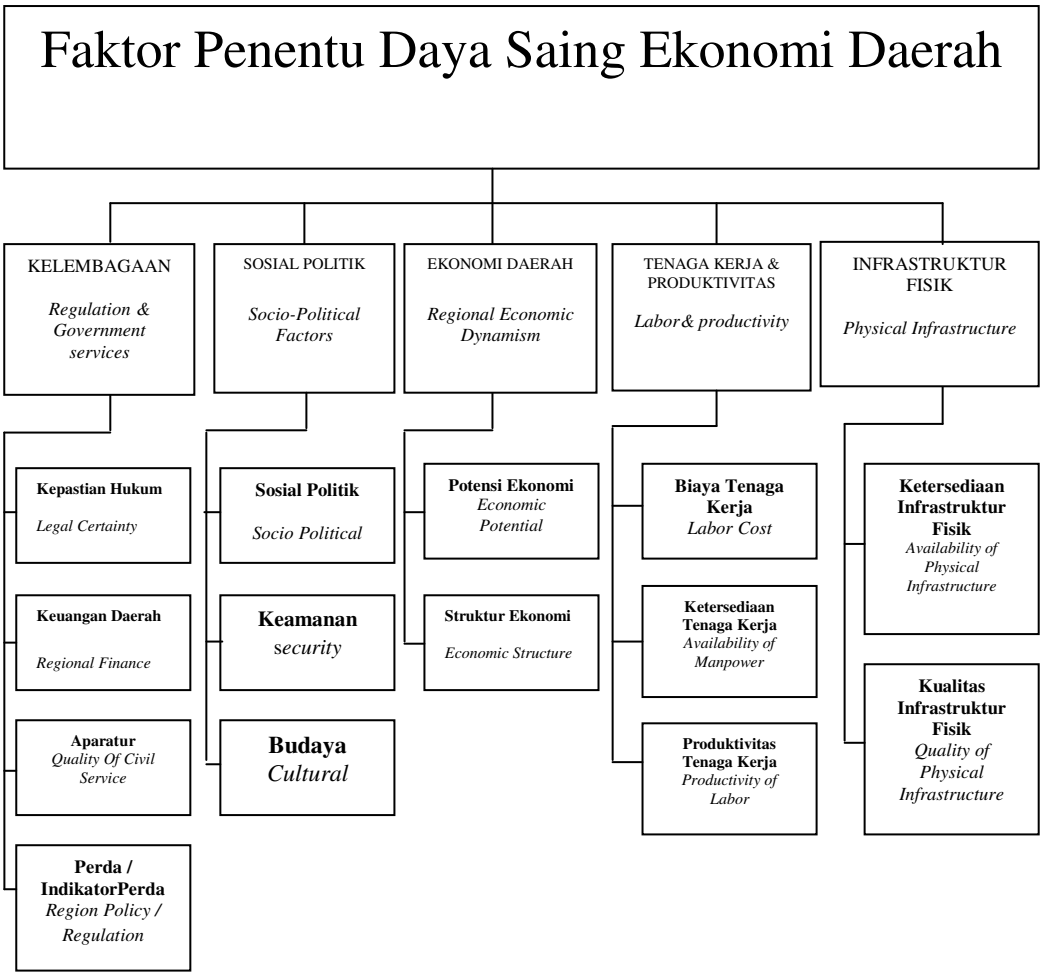

Sumber : KPPOD (2005)

Gambar 1
Indikator Utama Penentu Daya Saing Ekonomi Kota Tanjungbalai

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang berada dalam usia angakatan kerja yaitu 15 – 65 tahun dan bermukim di Kota Tanjung Balai. Tahun 2013, penduduk yang berada dalam usia angkatan kerja berjumlah 62.261 penduduk (BPS, 2014). Namun, dalam penelitian ini jumlah sampel ditetapkan 30 responden yang mewakili seluruh komponen masyarakat yang terdapat di 6 kecamatan di Kota Tanjung Balai. Adapun jumlah sampel berdasarkan kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Sampel Berdasarkan Kelompok Masyarakat

No	Kelompok Masyarakat	Responden
1	Pelajar / Mahasiswa	3
2	Staf Pengajar (Dosen / Guru)	3
3	Tokoh Masyarakat	4
4	Birokrasi	4
5	Perbankan	3
6	Non Perbankan	3
7	Pengusaha	10
	Jumlah	**30**

Metode Pengambilan Sampel

Perosedur pengambilan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan menentukan sampel atau responden yang dianggap dapat mewakili segmen kelompok masyarakat yang dinilai mempunyai pengaruh atau merasakan dampak besar terkait daya saing ekonomi daerah.

Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknikini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis daya saing ekonomi Kota Tanjung Balai pada tahun 2014 meliputi analisis deskriptif dan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). Analisis ini digunakan untuk memberikan nilai bobot setiap faktor dan variabel dalam menghitung faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tanjung Balai pada tahun 2014. Proses pemberian bobot indikator dan sub-indikator (variabel) dilakukan dengan menggunakan *Analitical Hierarchy Process* (AHP) melalui kuisioner untuk kelompok masyarakat yang sudah ditentukan sebelumnya dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Dalam pembobotan suatu faktor atau variabel dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, AHP juga mampu memberikan prioritas alternatif dan melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang responden (Saaty, 2002, dalam Hidayat, 2012).

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari:

1. *Resiprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan.
2. *Homogenity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan.
3. *Dependence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (*complete hierarchy*) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (*incomplete hierarchy*).
4. *Expectation*, yang berarti menonjolkon penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain sebagai berikut (Saaty, 1990) :

1. *Decomposition*
   Sistem yang kompleks dapat dengan mudah dipahami kalau sistem tersebut dipecah menjadi berbagai elemen pokok, kemudian elemen-elemen tersebut disusun secara hirarkis.
2. *Comparative Judgement*
   Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan criteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari elemen-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison.
3. *Synthesis of Priority*
   Dari setiap matriks *Pairwise Comparison* kemudian dicari *Eigenvector* dari setiap matriks *Pairwise Comparison* untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks *Pairwise Comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis di antara *local priority*.
4. *Logical Consistency*
   AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10% dan apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan maka doperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan.
5. *Matriks Pairwise*
   Dimana tidak ada yang bernilai 0 dan bilangan negatif sehingga dengan skala 1-9, maka syarat tersebut terpenuhi karena elemen terkecil adalah 1/9 dan terbesar 9.

Berikut ini arti dari angka 1-9 dalam skala penilaian perbandingan seperti yang ditujukan pada tabel berikut.

Tabel 2
Skala penilaian perbandingan

Skala tingkat kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sedikit memihat satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan elemen pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan yang tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/A_{ji}$	Bila aktivitas i memperoleh suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan i

Sumber: Thomas L. Saaty (1991)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan hasil tabulasi terhadap 30 responden yang menjadi sampel dalam peneltian ini didapat informasi bahwa responden berjenis kelamin pria dan wanita berjumlah seimbang, yaitu 50%. Sedangkan responden yang paling banyak diwawancarai berusia 20-30 tahun berkisar 47%. Kemudian diikuti oleh usia 41-50 berkisar sebesar 27%. Kemudian usia 31-40 berkisar 20%. Serta yang berusia diatas 50 tahun hanya sebesar 7%. Sementara itu untuk tingkat pendidikan, pada umumnya responden tamatan D3/S1/S2 sebesar 67% dan selebihnya tamatan SMA/Sederajat sebesar 30%. Dan hanya 3% responden yang tamatan SMP/Sederajat. Untuk lebih jelasnya, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	15	50%
2	Wanita	15	50%
	Usia (Tahun)	**Jumlah**	**Persentase**
1	20 – 30	14	47%
2	31 – 40	6	20%
3	41 – 50	8	27%
4	>50	2	7%
	Tingkat Pendidikan	**Jumlah**	**Persentase**
1	SMP/Sederajat	1	3%
2	SMA/Sederajat	9	30%
3	D3/S1/S2	20	67%

Sumber : Data Primer Diolah

Pembobotan dan Pemeringkatan Faktor Daya Saing Ekonomi

Daya saing ekonomi daerah merupakan representasi dari dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin baik kinerja indikator-indikator pembentuknya, maka akan semakin tinggi daya saing ekonomi suatu daerah. Sebaliknya, apabila kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing ekonomi tersebut rendah, maka daya saing ekonomi daerah tersebut juga rendah. Untuk melihat daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai, maka terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor penentu daya saing ekonomi dengan menentukan nilai bobot dari masing-masing faktor tersebut.

Pembobotan ini diperoleh dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Proccess* (AHP) dengan bantuan *Software* yaitu *Expert Choice.* Pembobotan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2014. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor menunjukkan bahwa faktor tersebut lebih penting dibandingkat dengan faktor lainnya dalam menentukan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai. Berikut ini hasil pembobotan dari faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

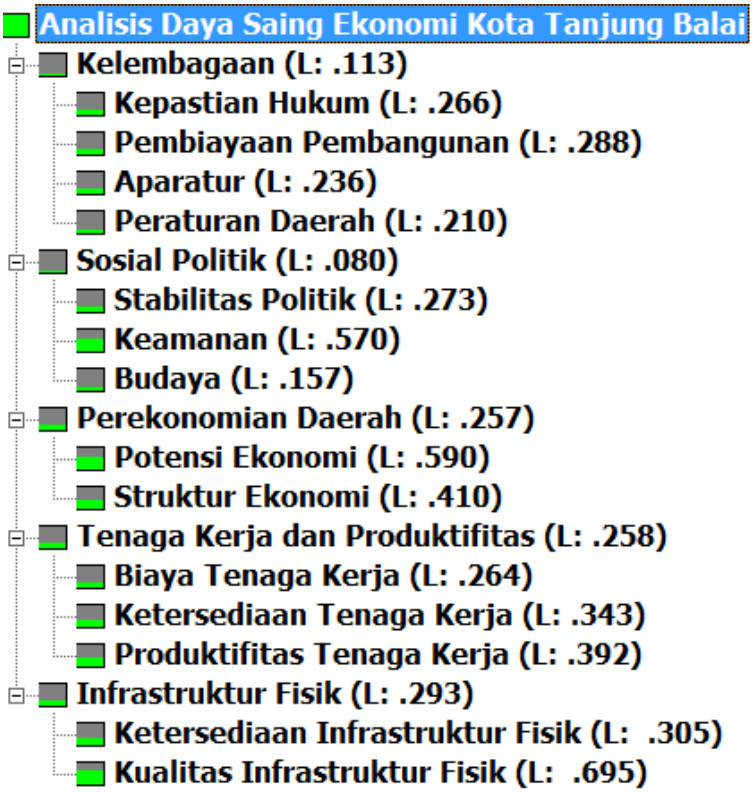

Gambar 2
Nilai Bobot dari Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Kota Tanjungbalai

Hasil diatas menunjukkan bahwa faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2014 adalah faktor infrastruktur fisik yang memiliki bobot paling tinggi yaitu sebesar 0,293. Kemudian diikuti oleh faktor tenaga kerja dan produktivitas sebesar 0,258. Berikutnya faktor perekonomian daerah dengan bobot sebesar 0,257 dan kemudian faktor kelembagaan dengan bobot sebesar 0,113. Faktor sosial politik berada di urutan terakhir dengan bobot sebesar 0,080.

Faktor Infrastruktur Fisik

Faktor infrastruktur fisik yang terdiri dari dua variabel yaitu ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur. Variabel ketersediaan infrastruktur fisik memiliki bobot sebesar 0,305 atau 31% dari keseluruhan bobot faktor infrastruktur fisik. Variabel kualitas infrastruktur fisik memiliki bobot sebesar 0,695 atau 69% dari keseluruhan bobot faktor infrastruktur fisik.

Menurut tanggapan responden menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur fisik lebih menjadi prioritas dalam faktor infrastruktur fisik. Hasil pembobotan ini didukung oleh hasil wawancara terhadap responden yang menunjukkan bahwa dalam variabel ketersediaan infrastruktur fisik, 63% responden menyatakan kurang setuju terdahap ketersediaan jalan yang sudah memadai. Hanya sekitar 10% responden yang menyatakan setuju bahwa ketersediaan jalan sudah memadai. 23% responden menyatakan tidak setuju kalau ketersediaan jalan sudah baik. Begitu juga dengan ketersedian pelabuhan laut yang sudah memadai. Hanya

10% responden yang menyatakan setuju kalau ketersediaan pelabuhan laut sudah memadai. 40% responden menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan ini. Dan 43% menyatakan tidak setuju kalau ketersediaan pelabuhan laut sudah memadai. Sedangkan untuk ketersediaan pelabuhan udara, 47% responden menyatakan sangat tidak setuju kalau ketersediaan pelabuhan udara di Kota Tanjungbalai sudah memadai. 37% responden menyatakan tidak setuju, dan hanya 10% responden yang menyatakan setuju bahwa ketersediaan pelabuhan udara sudah memadai. Untuk pelabuhan udara sendiri, Kota Tanjungbalai tidak memiliki pelabuhan udara. Oleh karena itu sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penyataan tersebut. Kemudian untuk ketersediaan saluran telepon, 90% responden setuju kalau ketersedian saluran telepon sudah memadai. Hanya 7% responden yang menyatakan tidak setuju, dan 3% responden menyatakan kurang setuju.

Dalam variabel kualitas infrastruktur fisik, 47% responden menyatakan tidak setuju terhadap kualitas jalan sudah yang baik. 43% responden menyatakan kurang setuju. Hanya 7% responden yang menyatakan sangat setuju kalau kualitas jalan di Kota Tanjungbalai sudah baik. Kemudian untuk akses dan kualitas pelabuhan laut yang sudah baik, 57% responden menyatakan tidak setuju bahwa akses dan kualitas pelabuhan laut sudah baik. 30% responden menyatakan kurang setuju. Dan hanya 10% responden yang menyatakan setuju. Sedangkan untuk akses dan kualitas pelabuhan udara yang sudah baik, 77% responden menyatakan sangat tidak setuju, dan hanya 7% responden yang menyatakan setuju. Sedangkan untuk kualitas saluran dan sambungan telepon yang sudah baik, 90% responden menyatakan setuju bahwa kualitas saluran dan sambungan telepon sudah baik.

Berdasarkan analisis dan persepsi dari para responden, hal ini menunjukkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur diharapkan agar bisa menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan pergerakan sumber-sumber ekonomi bagi peningkatan kegiatan ekonomi di Kota Tanjungbalai.

Faktor Tenaga kerja dan Produktivitas

Faktor tenaga kerja dan produktivitas terdiri dari 3 variabel, yaitu biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Variabel biaya tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,264 atau 27% dari keseluruhan bobot faktor tenaga kerja dan produktivitas. Variabel ketersediaan tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,343 atau 34%. Dan variabel produktivitas tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,392 atau 39% dari keseluruhan bobot faktor tenaga kerja dan produktivitas.

Menurut tanggapan responden, variabel produktivitas tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja menjadi prioritas dalam faktor tenaga kerja dan produktivitas. Kedua variabel tersebut dianggap sangat penting dalam menentukan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai dari faktor tenaga kerja dan produktivitas. Dari hasil wawancara persepsi masyarakat dalam variabel tenaga kerja, 60% responden menyatakan kurang setuju terhadap besarnya upah tenaga kerja sesuai dengan ketentuan UMK. Sekitar 30% responden setuju, dan 7% responden tidak setuju kalau besarnya upah tenaga kerja sudah sesuai dengan ketentuan UMK. Begitu juga dengan besarnya upah tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan hidup masyarakat, 57% responden menyatakan kurang setuju bahwa besarnya upah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Sekitar 20% responden setuju. Dan 20% responden juga menyatakan tidak setuju kalau besarnya upah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Dalam variabel ketersediaan tenaga kerja, untuk pernyataan jumlah angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, 53% responden kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. 23% responden menyatakan tidak setuju, dan 23% responden juga menyatakan setuju bahwa jumlah angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian untuk tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, 67% responden menyatakan kurang setuju, hanya 17% responden menyatakan setuju.

Dalam variabel produktivitas tenaga kerja, 63% responden kurang setuju bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja yang ada relatif tinggi. Namun, 30% responden menyatakan setuju kalau tingkat produktivitas tenaga kerja yang ada relatif tinggi. Kemudian untuk tingkat produktivitas tenaga kerja sesuai dengan besarnya upah yang ada, 70% responden menyatakan kurang setuju, hanya 23% responden yang menyatakan setuju bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja sesuai dengan besarnya upah yang ada.

Faktor Perekonomian Daerah

Faktor perekonomian daerah berisi variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi yang merupakan hal yang penting dalam mendukung daya saing ekonomi suatu daerah. Variabel potensi ekonomi memiliki bobot sebesar 0,590 atau 59% dari keseluruhan bobot faktor perekonomian daerah. Variabel stuktur ekonomi memiliki bobot sebesar 0,410 atau 41% dari keseluruhan bobot faktor perekonomian daerah.Dari tanggapan responden, variabel potensi ekonomi dianggap lebih penting dan menjadi prioritas dalam indikator perekonomian daerah dalam menentukan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai.

Dari hasil wawancara persepsi masyarakat dalam variabel potensi ekonomi, 60% responden menyatakan kurang setuju bahwa tingkat daya beli masyarakat cenderung meningkat. Tetapi, 37% responden menyatakan setuju, dan 3% responden bahkan menyatakan sangat setuju bahwa tingkat daya beli masyarakat cenderung semakin meningkat. Selanjutnya untuk perkembangan kondisi ekonomi yang semakin membaik, 70% responden menyatakan kurang setuju, 20% responden menyatakan setuju, dan 10% responden menyatakan sangat setuju bahwa perkembangan kondisi ekonomi semakin membaik. Kemudian, 67% responden kurang setuju bahwa kondisi harga-harga barang dan jasa relatif stabil dan terjangkau. Hanya 20% responden yang setuju dan 13% responden menyatakan tidak setuju. Selanjutnya untuk tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung semakin membaik, 53% responden kurang setuju, 40% responden setuju bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung semakin membaik, dan 3% responden tidak setuju.

Dalam variabel struktur ekonomi, 53% responden menyatakan setuju bahwa nilai tambah atau kontribusi sektor primer semakin meningkat. 43% responden menyatakan kurang setuju, dan 3% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, 53% responden setuju bahwa nilai tambah atau kontribusi

sektor sekunder semakin meningkat, dan 47% responden menyatakan kurang setuju. Kemudian, 73% responden setuju bahwa nilai tambah atau kontribusi sektor tersier semakin meningkat. 23% responden menyatakan kurang setuju, dan 3% responden sangat setuju bahwa nilai tambah atau kontribusi sektor tersier semakin meningkat.

Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan terdiri dari empat variabel, yaitu variabel kepastian hukum, variabel pembiayaan pembangunan (keuangan daerah), variabel aparatur, dan variabel peraturan daerah. seluruh variabel-variabel dalam faktor kelembagaan berada dibawah kendali pemerintah derah.

Variabel kepastian hukum memiliki bobot sebesar 0,266 atau 27% dari keseluruhan bobot faktor kelembagaan. Variabel pembiayaan pembangunan atau keuangan daerah memiliki bobot sebesar 0,288 atau 29% dari keseluruhan bobot faktor kelembagaan. Variabel aparatur memiliki bobot sebesar 0,236 atau 23% dari keseluruhan bobot faktor kelembagaan. Dan variabel peraturan daerah memiliki bobot sebesar 0,210 atau 21% dari keseluruhan bobot faktor kelembagaan.

Variabel pembiayaan pembangunan atau keuangan daerah menjadi variabel yang paling penting dalam menentukan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai. Diikuti dengan variabel kepastian hukum, kemudian variabel aparatur, dan terakhir variabel peraturan daerah.

Hasil wawancara persepsi masyarakat dalam variabel kepastian hukum, 60% responden menyatakan setuju bahwa konsistensi peraturan yang mengatur kegiatau usaha sudah berjalan baik. 30% responden kurang setuju, dan sebesar 7% responden menyatakan tidak setuju bahwa konsistensi perauran yang mengatur kegiatan usaha sudah berjalan baik. Selanjutnya, 67% responden setuju bahwa penegakan hukum dalam kaitannya dengan dunia usaha sudah baik. 23% responden menyatakan kurang setuju, 7% responden tidak setuju, dan 3% responden sangat setuju bahwa penegakan hukum dalam kaitannya dengan dunia usaha sudah baik. Kemudian 47% responden setuju bahwa pungli diluar birokrasi terhadap kegiatan usaha semakin berkurang, 27% responden menyatakan kurang setuju, 17% responden tidak setuju, dan 7% responden menyatakan sangat setuju bahwa pungli diluar birokrasi terhadap kegiatan usaha semakin berkurang.

Dalam variabel keuangan daerah, 43% responden kurang setuju bahwa jumlah APBD yang ada sekarang telah sesuai dengan kebutuhan. Namun, 40% responden menyatan setuju, 13% responden menyatakan tidak setuju, dan 3% responden menyatakan sangat setuju bahwa jumlah APBD yang ada sekarang telah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk realisasi APBD yang telah sesuai dengan rencana program dan anggaran 47% responden menyatakan setuju dengan hal ini. 37% responden kurang setuju, 13% responden menyatakan tidak setuju, dan 3% responden menyatakan sangat setuju. Kemudian 50% responden menyatakan kurang setuju bahwa tingkat penyimpangan dalam penggunaan APBD relatif rendah. 33% responden setuju, 13% responden tidak setuju, dan 3% responden menyatakan sangat setuju bahwa tingkat penyimpangan dalam penggunaan APBD relatif rendah.

Dalam variabel aparatur dan pelayanan, untuk birokrasi pelayanan terhadap dunia usaha yang semakin baik, 80% responden menyatakan setuju, hanya 10% responden yang menyatakan kurang setuju, 7% responden yang menyatakan sangat setuju, dan 3% responden yang menyakatan tidak setuju bahwa birokrasi pelayanan terhadap dunia usaha semakin baik. Selanjutnya untuk penyalahgunaan wewenang oleh aparatur yang semakin berkurang, 43% responden menyatakan setuju, 43% responden juga yang menyatakan kurang setuju. Selanjutnya untuk struktur pungutan oleh pemerintah daerah terhadap dunia usaha yang sudah sesuai, 80% responden menyatakan setuju, hanya 13% responden yang menyatakan kurang setuju bahwa struktur pungutan oleh pemerintah daerah terhadap dunia usaha sudah sesuai.

Dalam variabel peraturan daerah, mengenai peraturan produk hukum daerah berupa pajak dan retribusi sudah mendukung kegiatan dunia usaha, 97% responden menyatakan setuju. Hanya 3 % responden yang menyatakan kurang setuju bahwa peraturan produk hukum daerah berupa pajak dan retribusi sudah mendukung kegiatan dunia usaha. Kemudian mengena implementasi perda sudah sesuai dengan yang ditetapkan, 80% responden menyatakan setuju, dan hanya 20% responden yang kurang setuju bahwa implementasi perda sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

Dari keseluruhan variabel-variabel faktor kelembagaan di atas, variabel pembiayaan pembangunan atau keuangan daerah yang lebih perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar lebih diperbaiki untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai.

Faktor Sosial Politik

Faktor sosial politik terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel stabilias politik, variabel keamanan, dan variabel budaya masyarakat. Variabel stabilitas politik memiliki bobot sebesar 0,273 atau 28% dari keseluruhan bobot faktor sosial politk. Variabel keamanan memiliki bobot sebesar 0,570 atau 57% dari keseluruhan bobot faktor sosial politik. Dan variabel budaya memiliki bobot sebesar 0,157 atau 16% dari keseluruhan bobot faktor sosial politik.

Variabel keamanan, menjadi prioritas yang paling penting dalam menentukan daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai, diikuti oleh variabel stabilitas politik, kemudian variabel budaya. Dari hasil wawancara persepsi masyarakat dalam variabel stabilitas politik, 87% responden menyatakan setuju bahwa potensi konflik di masyarakat semakin menurun dan dapat dideteksi. Bahkan 10% responden menyatakan sangat setuju. Hanya 3% responden yang menyatakan kurang setuju bahwa potensi konflik di masyarakat semakin menurun dan dapat dideteksi. Selanjutnya, untuk intensitas unjuk rasa yang semakin menurun, 87% responden menyatakan setuju. 3% responden menyatakan sangat setuju. Hanya 3% responden yang kurang setuju, dan 3% responden juga yang menyatakan tidak setuju bahwa intensitas unjuk rasa yang ada diwilayah ini semakin menurun. Kemudian, 70% responden setuju bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif semakin baik. Hanya 27% responden yang menyatakan kurang setuju.

Dalam variabel keamanan, 93% responden setuju bahwa gangguan keamanan terhadap aktivitas dunia usaha semakin menurun. Hanya 7% responden yang

kurang setuju. Selanjutnya, 90% responden setuju bahwa gangguan keamanan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar tempat kegiatan usaha semakin menurun, bahkan 10% responden menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti tidak ada lagi gangguan keamanan terhadap masyarakat dilingkungan sekitar tempat kegiatan usaha. Kemudian, 77% responden setuju bahwa kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan semakin baik. Namun, 20% responden kurang setuju dengan pernyataan ini.

Dalam variabel budaya, 90% responden setuju bahwa partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini berarti, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah daerah mulai melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Namun, 7% responden menyatakan kurang setuju bahwa partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah semakin meningkat. Selanjutnya, untuk keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha yang semakin baik, 97% responden menyatakan setuju. Hanya 3% responden yang menyatakan kurang setuju. Selanjutnya untuk perilaku masyarakat terhadap diskriminasi yang semakin menurun, 83% responden menyatakan setuju, 10% responden menyatakan kurang setuju, dan 3% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa perilaku masyarakat terhadap diskriminasi semakin menurun. Selanjutnya 93% responden setuju bahwa adat istiadat masyarakat daerah semakin mendukung kegiatan dunia usaha. Hanya 3% responden yang menyatakan kurang setuju. Kemudian untuk etos kerja masyarakat daerah yang semakin meningkat, 60% responden setuju, 30% responden kurang setuju, 7% responden tidak setuju, dan 3% responden menyatakan sangat setuju bahwa etos kerja masyarakat daerah semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Dari hasil pembobotan dan pemeringkatan, faktor utama penentu daya saing ekonomi Kota Tanjungbalai adalah faktor infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 0,293. Diikuti oleh faktor tenaga kerja dan produktivitas dengan bobot sebesar 0,258. Kemudian faktor perekonomian daerah dengan bobot 0,257, kemudian faktor kelembagaan dengan bobot sebesar 0,113 atau. Serta faktor sosial politik dengan bobot sebesar 0.080.
2. Dalam faktor infrastruktur yang paling penting adalah variabel kualitas infrastruktur sebesar 69% dari keseluruhan bobot faktor infrastruktur fisik. Dimana kualitas infrastuktur yang perlu diperhatikan adalah kualitas jalan, kualitas pelabuhan laut, dan ketersediaan pelabuhan udara yang belum ada di Kota Tanjungbalai.
3. Faktor tenaga kerja dan produktivitas yang paling penting adalah variabel produktivitas tenaga kerja sebesar 39% dari keseluruhan bobot faktor tenaga kerja dan produktivitas.

4. Variabel yang menjadi prioritas untuk faktor perekonomian daerah adalah variabel potensi ekonomi sebesar 59% dari keseluruhan bobot faktor perekonomian daerah.
5. Variabel yang menjadi prioritas untuk faktor kelembagaan yang perlu diperhatikan adalah keuangan daerah atau pembiayaan pembangunan sebesar 29%. Kemudian disusul variabel kepastian hukum sebesar 27%, variabel aparatur 23%, dan perda 21%.
6. Untuk faktor sosial politik, variabel yang menjadi prioritas adalah variabel keamanan sebesar 56%. Dari hasil wawancara persepsi masyarakat terhadap variabel keamanan, sebagian besar responden menyatakan keamanan dalam aktivitas dunia usaha sudah semakin baik.

Saran

Dari kesimpulan diatas dapat memberikan saran antara lain:

1. Diperlukan perbaikan dalam kualitas dan ketersediaan infrastruktur sebagai upaya mendorong tumbuhnya kegiatan usaha baru, dan sebagai upaya untuk memudahkan mobilitas kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi di Kota Tanjungbalai
2. Perlunya keterlibatan dunia usaha dalam setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dalam kegiatan ekonomi karena pengusaha adalah pihak yang merasakan dampak paling besar dalam pembentukan daya saing ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, P., Alisjahbana, Armida, S., Effendi, N., Boediono, 2002. *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia,* Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian,* Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta

Badan Pusat Statistik, *Tanjung Balai dalam Angka,* Berbagai Edisi, Medan.

Charles, David, and Paul Benneworth, 1999. *"The Competitiveness Project 1998; Regional Benchmarking Report",* Centre for Urban And Regional Development Studies, University of Newcastle Upon Tyne, UK.

Economics and Statistics Directorate, 2000. *"UK Competitiveness Indicators"*, Department of Trade and Industry, UK.

Frinces, Helfin Z, 2011. *Persaingan dan Daya Saing : Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gardiner, B., Martin, R., Tyler, p., 2004. *Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions.* University of Cambridge, Cambridge.

Halwani, R., Hendra, 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi,* Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hidayat, Paidi, 2012. "Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan", *Jurnal Keuangan dan Bisnis,* Volume 4 Nomor 3, hal 228-238.

Irawati, Ira., Zulfadly Urufi, Renato Everardo Isaias Rezza Resobeoen, Agus Setiawan, Aryanto, 2008. "Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara", *Prosiding INSAHP5,* Semarang.

Indrawati, Dede, 2012. *"Analisis Elemen-Elemen Prakondisi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Daya Saing Investasi Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Bandung Barat)"*. Skripsi. Depok.

KPPOD, 2005. *"Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2004"*, KPPOD, Jakarta

Kuncoro, Mudrajad dan Anggi Rahajeng, 2005. "Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10 No.2, hal 171-184.

Millah, Anita Nur, 2013 *"Analisis Daya Saing Daerah di Jawa"*, Skripsi, Semarang.

PPSK-BI dan LP3E FE UNPAD, 2008. *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daeah Kabupaten/Kota di Indonesi,.* Rajawali Pers, Jakarta.

Porter, Michael E, 1990. *The Competitive Advantage of Nation,* The Free Press.

Saaty, Thomas L, 1990. *Decision Making For Leader :The Analytic Hierarchy Process For Decision in A Complex World,* University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Santoso, Eko Budi, 2009. "Daya Saing Kota-kota Besar di Indonesia", *Makalah,* Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, Surabaya.

Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan,* Edisi 1, Alfabeta Bandung.

Sugiyono, Fx, 2004. "Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 1 No. 1, hal 14-27.

Taniredja, Tukiran., Hidayati Mustafidah, 2011, *Penelitian Kuantitatif,* Alfabeta, Bandung

World Economic Forum, 2014. *The Global Competitiveness Report,* Oxford University Press, New York.